

Identifikasi indikator kinerja pengelolaan desa wisata rintisan, study kasus desa wisata Karang, Trimulyo, Sleman

Ani Wijayanti

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis,
Universitas Bina Sarana Informatika

ani.awi@bsi.ac.id

Yitno Purwoko

Prodi Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata “API” Yogyakarta

yitnopurwoko@yahoo.com

ABSTRACT

Karang tourism village is a pioneer tourism village that was just inaugurated in 2022. The management of the Karang tourism village involves various stakeholders consisting of academics, entrepreneurs, communities, association, and government. The performance of the management and development of the Karang tourism village is measured using several indicators that have an influence on the achievement of the tourism village management target. This study uses a quantitative descriptive approach. Primary data was obtained through an instrument consisting of eight performances measured by their respective indicators. The data analysis technique used is scoring and data reduction. The results showed that the measurement results of the eight management performances of Karang tourism village showed the highest value of 2.17, namely institutional performance, while the lowest value was 0.33 namely marketing performance. The performance rating of the management of the Karang tourism village has not reached very good, but it has only reached good and sufficient, this is in accordance with the category as a pioneer tourism village. Management performance that has a good rating, namely institutions, tourist attractions, and amenities. Meanwhile, management that received sufficient ratings, namely partnership, accessibility, community participation, tourism marketing, and conservation

Keywords: *Institutional, Pentahelix, Tourist Attractions, Community Participation, Performance*

ABSTRAK

Desa wisata Karang merupakan desa wisata rintisan yang baru diresmikan pada tahun 2022. Pengelolaan desa wisata Karang melibatkan berbagai *stakeholder* yang terdiri dari akademisi, pengusaha, masyarakat, komunitas, dan pemerintah. Kinerja pengelolaan dan pengembangan desa wisata Karang diukur menggunakan beberapa indikator yang mempunyai pengaruh dalam ketercapaian target pengelolaan desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Responden yang dipilih adalah pengelola desa wisata. Data primer diperoleh melalui instrument yang terdiri dari delapan kinerja yang diukur dengan indikator masing-masing. Teknis analisis data yang digunakan adalah skoring dan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengukuran terhadap delapan kinerja pengelolaan desa wisata Karang menunjukkan nilai tertinggi sebesar 2,17, yakni kinerja kelembagaan, sedangkan nilai terendah yakni 0,33 yakni kinerja pemasaran. Peringkat kinerja pengelolaan desa wisata Karang belum mencapai baik sekali, namun baru mencapai baik dan cukup, hal ini sesuai dengan kategori sebagai desa wisata rintisan. Kinerja pengelolaan yang mempunyai peringkat baik, yakni kelembagaan, atraksi wisata, dan amenities. Sedangkan, pengelolaan yang mendapat peringkat cukup, yakni kemitraan, aksesibilitas, partisipasi masyarakat, pemasaran pariwisata, dan konservasi.

Kata kunci : Kelembagaan, Pentahelix, Atraksi Wisata, Partisipasi Masyarakat, Kinerja

PENDAHULUAN

Desa wisata merupakan pariwisata berbasis masyarakat yang mempunyai tujuan utama memberdayakan masyarakat lokal. Desa wisata dikembangkan dengan konsep dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat. Pengelolaan desa wisata diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat setempat. Pariwisata berbasis masyarakat melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan industri pariwisata (Salazar, 2011). Masyarakat menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan pariwisata untuk peningkatan pendapatan melalui keterampilan yang dimilikinya (Kibicho, 2010).

Pengembangan desa wisata memperhatikan keseimbangan lingkungan dan mampu mewujudkan konsep konservasi. Pengembangan desa wisata tidak jarang menimbulkan berbagai dampak, diantaranya sosial, budaya, ekologi, ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan legitimasi harus diperkuat karena model konservasi berbasis masyarakat tidak mudah diterapkan (Sudiasmo & Yefi, 2021). Salah satu penyebab kegagalan pengelolaan konservasi berbasis masyarakat adalah perbedaan konsep dasar konservasi dari masyarakat setempat (Sinery & Manusawai, 2016). Konservasi bertujuan mewujudkan keseimbangan persediaan dengan memelihara dan meningkatkan kualitas melalui pengelolaan sumber daya secara bijaksana (Sudarmadji & Widyastuti, 2011).

Keberhasilan pengelolaan desa wisata sangat tergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat. Pengelolaan desa wisata dengan melibatkan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Masyarakat dengan berbagai karakteristik mudah menimbulkan konflik internal. Modal sosial menjadi salah satu faktor kunci utama keberhasilan pembangunan desa wisata. Keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dapat diukur melalui

beberapa indikator, meliputi; peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, pembangunan ekonomi masyarakat lokal, viabilitas komersial, pendidikan, modal sosial dan pemberdayaan, rasa memiliki masyarakat, manfaat kolektif, konservasi lingkungan, dan pariwisata (Goodwin & Santili, 2009). Sedangkan menurut Pergub D.I.Y No 40 tahun 2020 tentang kelompok sadar wisata dan desa/kampung wisata terdapat delapan aspek desa wisata, yakni kelembagaan, kemitraan, lingkungan dan pelestarian, peran serta masyarakat, atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, dan promosi dan pemasaran

Masyarakat merupakan sumber daya utama keberhasilan pengelolaan sebuah desa wisata yang relatif paling sulit untuk dikelola, karena pada umumnya masyarakat desa tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang pariwisata. Merubah mindset masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pengelolaan pariwisata relatif cukup sulit. Pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini masyarakat harus dilakukan secara berkala dan terus menerus. Masyarakat yang mempunyai kesadaran penuh akan pentingnya pariwisata sangat diperlukan dalam pengelolaan desa wisata. Pengelolaan desa wisata yang diinisiasi oleh masyarakat memiliki dasar yang kuat dan lebih cepat berkembang. Pengelolaan desa wisata yang diinisiasi oleh masyarakat dikenal dengan model atau pendekatan *bottom-up* (Asker dkk., 2010), sedangkan pengelolaan desa wisata yang diinisiasi oleh pemerintah dikenal dengan pendekatan *top-down* (Baskoro & Cecep, 2008). Pendekatan *bottom-up* merupakan salah satu konsep pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan pelestarian budaya tradisional, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan pendapatan tingkat lokal (Yamashita, 2011).

Pandemi covid-19 memberikan perspektif baru bagi wisatawan untuk memilih destinasi wisata berbasis alam dan

mengimplementasikan protokol kesehatan. Pergeseran perilaku wisatawan tersebut mendorong pertumbuhan desa wisata di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2022 tercatat Kabupaten Sleman memiliki desa wisata yang paling banyak, dibandingkan tiga Kabupaten dan satu Kotamadya di D.I.Y yakni 80 Desa Wisata (Dinas Pariwisata D.I.Y, 2022). Wisata pedesaan menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan karena menawarkan atraksi wisata dengan suasana ruang terbuka yang relatif aman dari paparan Covid-19. Pola perjalanan wisatawan pasca pandemi mengutamakan implementasi protokol kesehatan dan keberlanjutan lingkungan, sehingga daya tarik wisata alam menjadi daya tarik utama, sedangkan daya tarik penunjangnya yakni wisata budaya dan buatan dengan didukung kesiapan masyarakat dalam pengelolaannya (Harianja dkk., 2022).

Desa wisata Karang merupakan salah satu desa wisata yang terletak di Karang Kepanjen, Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, D.I.Y. Desa wisata Karang merupakan desa wisata yang baru dikembangkan dan masuk pada kategori desa wisata rintisan, yakni masih berupa potensi dengan sarana dan prasarana yang relatif terbatas, kunjungan wisatawan masih sangat sedikit, serta masyarakat belum mempunyai kesadaran yang kuat akan potensi wisata yang dimiliki (Unair News, 2021).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi indikator kinerja pengelolaan desa wisata Karang sebagai desa wisata rintisan. Indikator merupakan alat ukur ketercapaian kinerja pengelolaan desa wisata Karang, meliputi; kelembagaan, kemitraan, konservasi, partisipasi masyarakat, atraksi wisata, aksesibilitas, amenities, dan pemasaran pariwisata. Unsur kinerja pengelolaan yang digunakan mengacu pada Pergub D.I.Y No 40 Tahun 2020 tentang kelompok sadar wisata dan desa/kampung wisata.

TINJAUAN LITERATUR

Pariwisata Berbasis Masyarakat

Salah satu bentuk pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT) adalah desa wisata. Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang mencakup keseluruhan suasana serta keaslian sebuah pedesaan, meliputi; kehidupan sehari-hari masyarakat desa, adat-istiadat, sosial budaya, tata ruang desa, dan keunikan bangunan arsitektur (Priasukmana & Mulyadin, 2013). Kawasan pedesaan memiliki tradisi dan budaya yang masih asli, serta mempertahankan faktor pendukung, diantaranya unsur pertanian, sosial, budaya, dan lingkungan (Zakaria & Suprihardjo, 2014). Daya tarik utama sebuah desa wisata adalah potensi lokal yang dimiliki berupa budaya asli yang unik dan mendasari terciptanya kegiatan pariwisata di desa. Selain budaya asli yang unik, sebuah desa dikatakan sebagai desa wisata apabila memiliki berbagai persyaratan lain, diantaranya; aksesibilitas yang baik, sehingga wisatawan dapat berkunjung menggunakan berbagai jenis transportasi; memiliki tradisi yang menarik, seperti alam, seni dan budaya, legenda, makanan lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata; mendapat dukungan yang cukup dari masyarakat dan pemerintah; mempunyai jaminan keamanan; tersedia akomodasi, sarana telekomunikasi; memiliki sumber daya manusia yang memadai; dan mempunyai iklim sejuk dan dingin (Hadiwijoyo, 2012). Konsep CBT sebagai sarana untuk pengembangan kualitas masyarakat lokal menganut beberapa prinsip penting, meliputi; berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek, mengidentifikasi dan mempromosikan kepemilikan masyarakat atas pariwisata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjamin konservasi lingkungan dan budaya, dan mendistribusikan manfaat secara adil bagi semua masyarakat lokal (Suansri, 2003). Pengembangan CBT dapat dilakukan dengan menjadikan desa sebagai pusat wisata edukasi, pengembangan SDM, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung (Kiswanto & Susanto, 2021).

Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan pariwisata berbasis nilai-nilai lokal, meliputi budaya, sejarah, alam, dan ekonomi lokal (Basyuni dkk., 2018). Keterlibatan masyarakat lokal yang disinergikan dengan pembangunan ekologis mampu menarik minat kunjungan wisatawan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat (Maemunah, 2021; Surjanti dkk., 2020). *Community Based Tourism* (CBT) mempunyai konsep pengembangan pariwisata yang menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung (Purnamasari, 2011; Nugroho, 2018). Pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu bentuk pariwisata minat khusus, sebagai alternatif lain dari pariwisata massal yang memberikan dampak kerusakan terhadap sosial, budaya, dan lingkungan alam (Weaver, 2010).

Pengelolaan desa wisata secara efektif berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat sebagai dampak dari perubahan tiga aspek keberlanjutan, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini harus diseimbangkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan budaya sebagai nilai jual pariwisata (Yoga dkk., 2017). Pariwisata berbasis masyarakat membuka peluang kerja yang luas dibidang pariwisata, dan berdampak pada berbagai aspek, diantaranya peningkatan pendapatan masyarakat lokal sebagai aspek ekonomi, peningkatan kualitas hidup sebagai aspek sosial, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata sebagai aspek politik, dan aktivitas konservasi lingkungan sebagai aspek lingkungan (Rahayu dkk., 2016).

Keberlanjutan sebuah desa wisata tidak bisa terlepas dari aktivitas promosi wisata sebagai bagian dari kegiatan pemasaran. Promosi desa wisata yang efektif dapat dilakukan melalui dua cara, yakni pemanfaatan

media sosial dan penyelenggaraan event. Upaya promosi pariwisata dapat optimal dengan adanya kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, diantaranya. Pemerintah dan masyarakat setempat (Juliana dkk., 2020).

Partisipasi Masyarakat

Model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha pariwisata, dan *stakeholder* lainnya (Permatasari, 2022). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terutama dalam penentuan arah kepariwisataan sangat penting bagi keberlanjutan sebuah desa wisata. Partisipasi penuh dari masyarakat sejak perencanaan memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi berbagai dampak yang mungkin timbul dari sebuah aktivitas wisata dan menjadi dasar dalam merumuskan strategi untuk meminimalkan berbagai dampak negatif yang mungkin timbul (Adikampana, 2017). Keterlibatan masyarakat bersifat langsung dan tidak langsung, dari pemberian ide, perencanaan, perumusan kebijakan, sampai implementasi program dan melakukan evaluasi terhadap program yang dijalankan (Rubiantoro, 2013).

Pengembangan desa wisata sangat dekat dengan kehidupan masyarakat desa, sehingga masyarakat mempunyai peran sebagai objek dan subjek yang menjadi jantung dari keberlanjutan pembangunan desa wisata. Salah satu model pendekatan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan adalah *bottom-up* yang mempunyai karakter spontan dan muncul dari inisiatif masyarakat setempat. Pendekatan *bottom-up* terlihat dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa wisata sebagai pengambil keputusan dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat sesuai dengan kapasitas masing-masing sejak awal. Dalam mengembangkan desa wisata, peran serta masyarakat menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan desa wisata berjalan sesuai dengan harapan. Partisipasi masyarakat

tidak dapat diabaikan karena masyarakat lokal memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap daerahnya dibandingkan dengan masyarakat luar (Asker dkk, 2010). Selain partisipasi, keberhasilan pengelolaan desa wisata juga dipengaruhi oleh kemandirian masyarakat yang terdiri dari; integritas, kepercayaan masyarakat, ketahanan masyarakat, komitmen, dan keberlanjutan (Hutagalung dkk., 2022).

Keberhasilan pembangunan desa wisata melibatkan berbagai sektor, diantaranya pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan sektor lainnya dengan fungsi dan peran masing-masing. Pengembangan pariwisata merupakan usaha yang sangat kompleks, sehingga peran aktif setiap pemangku kepentingan terkait sangat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendalian setiap aktivitas pariwisata. Sinergisitas antar lembaga, baik formal maupun informal sangat dibutuhkan untuk menata dan meminimalisir dampak negatif dari aktivitas pariwisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012). Dalam pengembangan desa wisata pemerintah mempunyai peran sebagai regulator, fasilitator, dan eksekutor untuk mendorong pengembangan desa wisata sesuai potensi yang dimiliki melalui; mengkaji desa wisata secara komprehensif, merencanakan dan mengintegrasikan rencana pembangunan di level yang lebih tinggi dengan rencana kerja masyarakat, memberikan pelatihan untuk pengembangan kapasitas masyarakat lokal, dan melakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan pariwisata (Nurdin, 2014).

Kendala Pengelolaan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata dengan keterlibatan masyarakat sebagai motor penggerak utama menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Beberapa kendala pengelolaan desa wisata diantaranya, bantuan dana dari pemerintah setempat masih relatif rendah, keterbatasan sarana dan prasarana objek wisata sangat berdampak pada kualitas daya tarik wisata, pengelolaan pariwisata yang belum optimal, dan

keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang pariwisata (Azni & Alfitri, 2020). Kendala lain yang menyebabkan lambatnya pembangunan desa wisata adalah rendahnya perencanaan dan dukungan dari pemangku kepentingan terkait. Dukungan pemerintah yang minim dan rendahnya kerjasama dengan pihak swasta menjadi kendala dalam pengelolaan desa wisata (Sunarjaya dkk., 2018). Perencanaan secara menyeluruh dalam pengembangan desa wisata sangat dibutuhkan untuk mencegah dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan fisik secara permanen, perubahan kawasan historis dan sumber daya alam, kerumunan orang berlebihan, kemacetan, pencemaran lingkungan, dan masalah lainnya (Mill, 2000).

Secara menyeluruh berbagai kendala yang sering terjadi dalam pengembangan desa wisata, meliputi; kebersihan lingkungan desa, belum memiliki program kerja yang strategis, tata ruang belum baik, fasilitas dan infrastruktur belum memadai, rendahnya partisipasi *stakeholder* terkait, penyuluhan dan pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia masih terbatas, masyarakat belum berpartisipasi sepenuhnya dalam perencanaan, pengembangan dan pengawasan karena masih rendahnya pengalaman dan keahlian bidang pariwisata, belum mempunyai paket wisata yang pasti untuk dipromosikan, dan sinergisitas antar *stakeholder* belum terbangun secara optimal (Sunarjaya dkk., 2018), serta belum ada *agent of change* yang mampu mengkoordinasikan peran setiap *stakeholders* (Mertha dkk., 2018). Berbagai kendala lain yang juga sering terjadi dalam pengelolaan desa wisata, yakni; kebijakan pemerintah desa yang kadang kurang mendukung proses pengelolaan, kapasitas anggota pokdarwis yang masih terbatas, partisipasi masyarakat yang masih rendah, serta persaingan dengan desa wisata lain yang pertumbuhannya sangat cepat (Hadi & Widyaningrum, 2022). Menurut Kusuma & Salindri (2022) kendala utama pengelolaan desa wisata berkaitan erat dengan kualitas SDM, diantaranya kemampuan anggota pengurus dalam mengelola, termasuk kompetensi dalam mengemas produk wisata.

Desa Wisata Rintisan

Desa wisata rintisan merupakan desa wisata yang masih berupa potensi, dengan sarana dan prasarana relatif terbatas, serta kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang dalam bidang pariwisata, sehingga belum ada atau sangat minim kunjungan wisatawan (Unair News, 2021). Pengembangan desa wisata rintisan dapat dilaksanakan melalui program pengabdian, meliputi; berbagai pelatihan bidang pariwisata, sosialisasi sadar wisata, pendampingan pengelolaan desa wisata, pendampingan pembangunan website, pelatihan promosi pariwisata, dan pendampingan kelembagaan yang terdiri dari; perbaikan manajemen prokdarwis, perbaikan administrasi dan kearsipan, dan pendampingan pengurus dan anggotanya (Darwanto, 2018). Pemberdayaan desa wisata rintisan dapat dilakukan melalui edukasi pembuatan produk inovatif untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dan menyelenggarakan berbagai *event* untuk menarik dan meningkatkan minat kunjungan wisatawan (Abadiyah dkk., 2022).

Pemanfaatan teknologi bagi desa wisata rintisan sangat penting untuk membantu proses pengelolaan desa wisata secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi secara optimal memberi berbagai kemudahan bagi masyarakat dan wisatawan dalam beraktivitas wisata, misalnya dalam pengelolaan data base, aktivitas pemasaran, penyediaan informasi, layanan pemesanan, kemudahan akses internet, dan lain sebagainya (Putri dkk., 2020).

Keberhasilan pengelolaan desa wisata rintisan dipengaruhi oleh berbagai indikator yang merupakan alat ukur ketercapaian sebuah tujuan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi indikator yang digunakan

dalam pengelolaan desa wisata rintisan dan menganalisis sejauh mana kontribusi indikator tersebut dalam mendorong keberhasilan pengelolaan sebuah desa wisata, terutama pada kategori desa wisata rintisan. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengelolaan desa wisata secara umum dan belum mengidentifikasi indikator secara spesifik.

METODE, DATA DAN ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mendeskripsikan secara objektif pengelolaan desa wisata Karang menggunakan data atau informasi berupa kalimat maupun angka dari pengumpulan data primer maupun sekunder (Arikunto, 2006). Data primer diperoleh melalui penilaian kinerja pengelolaan desa wisata menggunakan instrumen yang terdiri dari beberapa indikator untuk mengukur ketercapaian aspek pengelolaan desa wisata, meliputi kelembagaan, kemitraan, konservasi, partisipasi masyarakat, atraksi wisata, aksesibilitas, amenities, dan pemasaran pariwisata. Delapan aspek tersebut merupakan persyaratan mendasar sebuah desa wisata yang digunakan dalam penyusunan instrumen kinerja pengelolaan desa wisata seperti yang disajikan pada Tabel 1. Variabel-variabel pada tabel Instrumen Kinerja Pengelolaan Desa Wisata tersebut berasal dari Pergub D.I.Y No. 40 tahun 2020 dengan penambahan penajaman melalui indikator-indikator capaian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei, observasi, dan wawancara secara langsung terhadap pengelola desa wisata terdiri ketua desa wisata, wakil ketua, dan beberapa ketua bidang. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dari berbagai referensi baik offline maupun online.

Tabel 1. Instrumen Kinerja Pengelolaan Desa Wisata

No	Kinerja	Definisi Operasional	Indikator (Alat Pengukur Ketercapaian Kinerja)
1	Kelembagaan.	Kelembagaan meliputi manajemen dan administrasi (Darwanto, 2018).	1).Struktur organisasi, 2).AD/ART, 3).Transparansi keuangan, 4).Database wisatawan, 5).Masterplan, dan 6).Pemandu lokal.
2	Kemitraan.	Sinergisitas untuk meminimalisir dampak pariwisata (Kemenparekraf, 2012).	1).Kemitraan eksternal, 2).Kemitraan internal, 3).Kontribusi kemitraan, dan 4).Keberlanjutan kemitraan.
3	Atraksi Wisata		1).Wisata Alam, 2).Wisata Budaya, 3).Wisata Buatan, 4).Paket Wisata, 5).Industri Kreatif, 6).Kehidupan Sosial, 7).Event Berkala 8). <i>Unique Selling Point</i>
4	Aksesibilitas	Desa wisata memiliki persyaratan, diantaranya, aksesibilitas, atraksi wisata, dan amenitas (Hadiwijoyo, 2012).	1).Penunjuk Arah, 2).Akses Jalan, 3).Peta Kawasan, 4).Penerangan Jalan, dan 5).Layanan Disabilitas.
5	Amenitas		1).Fasilitas Makan-Minum, 2).Kantor Sekretariat, 3).Gerai Souvenir, 4).Jaringan Internet, 5).Fasilitas P3K, 6).Jaringan Listrik, 7).Air Bersih, 8).Area parkir, 9).Lahan Terbuka, 10).Sarana Peribadahan, 11).Toilet, dan 12).Homestay
6	Partisipasi Masyarakat	Prinsip konsep CBT, diantaranya	1).Partisipasi dalam pengelolaan, 2).Partisipasi dalam pemodal, dan 3).Pemberdayaan masyarakat
7	Pemasaran Pariwisata	keterlibatan masyarakat, promosi kepemilikan masyarakat, konservasi lingkungan dan budaya (Suansri, 2003).	1).Memiliki MoU, 2). <i>Digital Marketing</i> , 3). <i>Direct Promotion</i>
8	Konservasi		1).Kebijakan pelestarian, 2).Kelembagaan pelestarian, 3).Fasilitas Pelestarian, 4).Pelatihan Budaya secara rutin, 5).Pengelolaan Limbah, dan 6).Mitigasi Bencana.

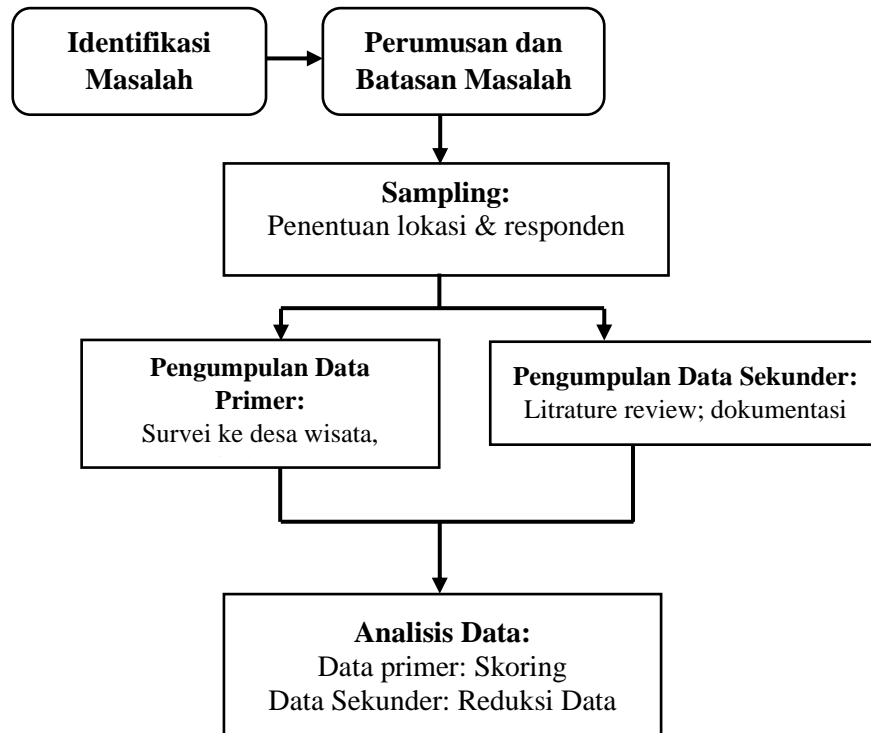
Sumber: Peneliti, modifikasi Pergub D.I.Y No. 40 tahun 2020, (2022)

Teknik analisis data dilakukan dengan dua cara, yakni teknik skoring untuk data primer dan reduksi data untuk data sekunder. Teknik skoring dilakukan dengan memberikan skor atau nilai pada masing-masing indikator ketercapaian pada setiap aspek pengelolaan desa wisata untuk menentukan tingkat kinerja setiap indikator. Tahapan skoring dilakukan sebagai berikut;

1. Penentuan skor atau nilai menggunakan skala 1 sampai 4, dimana nilai 1 untuk kinerja pengelolaan terendah dan nilai 4 menunjukkan kinerja pengelolaan tertinggi.
2. Skor maksimal setiap indikator adalah 4, maka total skor untuk 46 indikator adalah 184, sedangkan skor minimal adalah 46.
3. Perhitungan nilai akhir dilakukan dengan membagi skor yang diperoleh dengan skor maksimal dikalikan bobot setiap kinerja.
4. Besaran pembobotan diberikan berdasarkan tingkat kepentingan kinerja dalam pengelolaan desa wisata, sebagai berikut;

- a. Kelembagaan dinilai paling tinggi dan sebagai syarat keberlanjutan pengelolaan desa wisata, sehingga diberi bobot 20%
 - b. Setelah kelembagaan, kinerja yang juga dinilai tinggi, yakni aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dengan bobot 10%. Akses menuju sebuah desa wisata sangat penting untuk menarik wisatawan, serta keterlibatan masyarakat merupakan modal sosial utama untuk mengelola desa wisata.
 - c. Keenam kinerja lainnya, yakni atraksi wisata, amenitas, kemitraan, pemasaran pariwisata, dan konservasi diberi bobot 10%
5. Peringkat kinerja dihitung menggunakan interval yang ditentukan melalui nilai akhir maksimal dikurangi nilai akhir minimal dibagi delapan kinerja, diperoleh nilai interval sebesar 1,29.
 6. Interval peringkat kinerja, dibagi menjadi tiga, yakni; Baik Sekali (> 2,58); Baik (1,29-2,58); dan Cukup (< 1,29).

Bagan Alur Metode Penelitian disajikan pada Gambar 1.



Sumber: Peneliti (2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa wisata Karang merupakan salah satu desa wisata berkategori Rintisan yang baru diresmikan pada tahun 2022. Desa wisata Karang terletak di sebelah selatan Gunung Merapi atau tepatnya berada di Desa Trimulyo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa wisata Karang mempunyai ikon *Kebon Lesung*, yakni sebuah kebun yang menyimpan *lesung* atau alat penumbuk padi dari batu kali yang merupakan peninggalan nenek moyang. Potensi wisata yang ditawarkan desa wisata Karang, meliputi;

1. Spot fotografi

Desa wisata mempunyai jarak ideal dengan Gunung Merapi, yakni 19,5 km, sehingga sering dijadikan tempat untuk menyaksikan erupsi dan menyalurkan hobi fotografi karena memiliki spot yang menarik.

2. Spot pemancingan

Desa wisata ini dilewati tiga saluran irigasi yang tidak pernah kering dan menjadi potensi spot pemancingan, salah satunya Waduk Kacung.

3. Wisata air

Sebelah timur desa wisata mengalir Kali Sempor sebagai wahana menyusun batu atau *stone balancing*, atraksi *ciblon* atau mandi, mencari ikan dan mengenal berbagai jenis ikan air tawar, susur sungai, dan tubing.

4. Kuliner

Desa wisata Karang menyajikan aneka makanan tradisional setiap hari sabtu dan minggu dipasar Tiban *Kebon Lesung*, yang dikenal dengan Sunmor Katris sebagai agenda unggulan untuk menarik minat kunjungan, sekaligus sebagai wadah promosi UMKM dan pertunjukan seni lokal.

5. *Camping Ground*

Wisatawan bisa berkemah di Kebon Lesung atau di area bantaran sungai, yang dikenal dengan ledok.

6. Wisata edukasi Pertanian

Paket edukasi yang diberikan merupakan paket wisata bertani, dari menyiapkan lahan, menyemai benih padi, menanam

padi, memupuk padi, memanen padi, sampai menumbuk padi menjadi beras.

7. Atraksi Tumbuk Padi

Atraksi menumbuk padi secara tradisional menggunakan *lesung* diperagakan oleh ibu-ibu di Kebon *Lesung* yang berlokasi di atas Kali Sempor. Pada saat yang bersamaan, Bapak-bapak memperagakan proses penggilingan padi secara tradisional.

Selain atraksi wisata tersebut, desa wisata Karang juga menawarkan atraksi wisata lain, penting dalam menjamin keamanan wisatawan yang sedang beraktivitas di area sungai.

Analisis Indikator Kinerja Pengelolaan Desa Wisata Karang

diantaranya *outbound*, seni kerawitan, budaya *wiwit*, dan budidaya jamur tiram.

Pengelola desa wisata memperhatikan keamanan wisatawan, terutama yang melakukan aktivitas wisata di area perairan atau sungai. Pihak pengelola bekerjasama dengan posko pengamanan sungai sehingga selalu mendapat *Early Warning System* apabila ada kenaikan debit air sungai. Hal ini merupakan salah satu bentuk mitigasi bencana yang sangat

Pengukuran kinerja pengelolaan desa wisata Karang menggunakan instrumen yang melibatkan delapan aspek, yakni; kelembagaan, kemitraan, lingkungan, partisipasi masyarakat, atraksi wisata, aksesibilitas, amenities, dan pemasaran. Hasil pengukuran disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Pengukuran Kinerja Pengelolaan Desa Wisata Karang

No	Indikator	Skor	No	Indikator	Skor	No	Indikator	Skor
I	Kelembagaan		IV	Aksesibilitas		VI	Partisipasi Masyarakat	
	a Struktur organisasi	4		a Penunjuk Arah	2		a Partisipasi Pengelolaan	4
	b AD/ART	4		b Akses Jalan	3		b Partisipasi Pemodalan	3
	c Transparansi Keuangan	4		c Peta Kawasan	1		c Pemberdayaan	4
	d Database wisatawan,	1		d Penerangan Jalan	4		Jumlah	11
	e Masterplan	4		e Layanan Disabilitas.	1		Pembobotan 15%	0,90
	f Pemandu lokal	3		Jumlah	11			
	Jumlah	20		Pembobotan 15%	0,90	VII	Pemasaran Pariwisata	
	Pembobotan 20%	2,17	V	Amenitas			a Memiliki MoU	1
II	Kemitraan			a Fasilitas Makan-Minum	1		b <i>Digital Marketing</i>	4
	a Kemitraan eksternal	4		b Kantor Sekretariat	2		c <i>Direct Promotion</i>	1
	b Kemitraan internal	2		c Gerai Souvenir	1		Jumlah	6
	c Kontribusi kemitraan	3		d Jaringan Internet	4		Pembobotan 10%	0,33
	d Keberlanjutan kemitraan	4		e Fasilitas P3K	2	VIII	Konservasi	
	Jumlah	13		f Air Bersih	3		a Kebijakan Pelestarian	4
	Pembobotan 10%	0,71		g Area parkir	3		b Kelembagaan Pelestarian	4
III	Atraksi Wisata			h Lahan Terbuka	4		c Fasilitas Pelestarian	4
	a Wisata Alam	3		i Sarana Peribadahan	4		d Pelatihan Budaya rutin	3
	b Wisata Budaya	4		j Toilet	2		e Pengelolaan Limbah	4
	c Wisata Buatan	3		k Homestay	4		f Mitigasi Bencana	4
	d Paket Wisata	2		Jumlah	30		Jumlah	23
	e Industri Kreatif	4		Pembobotan 10%	1,63		Pembobotan 10%	1,25
	f Kehidupan Sosial	4						
	g Event Berkala	4						
	h <i>Unique Selling Point</i>	4						
	Jumlah	28						
	Pembobotan 10%	1,52						

Sumber: Analisis Data (2022).

Dari data pada Tabel 2 tercatat bahwa kinerja kelembagaan mempunyai nilai akhir tertinggi sebesar 2,17, sedangkan nilai terendah yakni kinerja pemasaran sebesar 0,33. Berdasarkan peringkat kinerja pengelolaan, maka kinerja pengelolaan yang dinilai baik dengan range nilai 1,29-2,58 yakni kelembagaan, atraksi wisata, dan

amenitas. Sedangkan, pengelolaan yang mendapat peringkat cukup dengan nilai kurang dari 1,29, yakni kemitraan, aksesibilitas, partisipasi masyarakat, pemasaran pariwisata, dan konservasi. Dari delapan kinerja pengelolaan belum ada yang dinilai mempunyai kinerja baik sekali. Hal ini sesuai dengan kriteria desa wisata Karang

sebagai desa wisata rintisan yang belum genap berumur satu tahun.

Analisis delapan kinerja pengelolaan desa wisata Karang diuraikan secara detil, sebagai berikut:

1. Kelembagaan

Kinerja kelembagaan diukur menggunakan enam indikator, meliputi; struktur organisasi, AD/ART, transparansi keuangan, database wisatawan, masterplan, dan pemandu lokal. Indikator yang mendapat skor 4 mendominasi, yakni 67% terdiri dari struktur organisasi, AD/ART, transparansi keuangan, dan master plan, seperti terlihat pada Gambar 2. Indikator yang dinilai masih lemah adalah database wisatawan. Sedangkan indikator pemandu lokal sudah cukup memadai namun belum optimal. Desa wisata Karang sendiri belum mempunyai data kunjungan wisatawan secara detil.



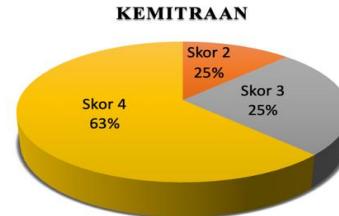
Gambar 2. Persentase Kinerja Kelembagaan Desa Wisata Karang

Sumber: Analisis Data Primer (2022)

Pengelola Desa Wisata memiliki struktur pengurus wisata yang disahkan oleh pihak terkait, serta telah merumuskan AD/ART sebagai pedoman yang berisi peraturan untuk semua anggota pengelola desa wisata. Pencatatan keuangan sudah dilaporkan secara transparan dalam pertemuan rutin dan dikelola berbasis digital (Darwanto, 2018). Namun belum ada pencatatan jumlah wisatawan yang berkunjung di desa wisata. Dalam pengelolaannya, desa wisata Karang sudah memiliki dokumen perencanaan yang sudah dijalankan secara berkala, serta memiliki pemandu lokal berbahasa asing, namun belum tersertifikasi.

2. Kemitraan

Kinerja kemitraan diukur melalui empat indikator, yakni kemitraan eksternal, kemitraan internal, kontribusi kemitraan, dan keberlanjutan kemitraan, Nilai indikator dari kinerja kemitraan cukup merata, dengan skor 2 sampai 4, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Persentase Kinerja Kemitraan Desa Wisata Karang

Sumber: Analisis Data Primer (2022)

Dilihat dari kemitraan secara eksternal, desa wisata Karang sudah membangun kemitraan dengan *stakeholder* mencakup pentahelix, yakni akademisi, pengusaha, komunitas, pemerintah, dan masyarakat. *Stakeholder* mempunyai kontribusi yang cukup besar dan berkelanjutan, baik dalam bentuk dana *cash* maupun maupun *inkind* (Permatasari, 2022). Namun demikian, kemitraan internal masih lemah, terlihat dari rendahnya koordinasi antar berbagai sektor, meliputi; perangkat dusun, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Wanita Tani (KWT), pengelola destinasi, dan lainnya.

3. Atraksi wisata

Kinerja atraksi wisata diukur menggunakan delapan indikator, yakni; wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, paket wisata, industri kreatif, kehidupan sosial, *event* berkala, dan *Unique Selling Point*. Nilai indikator kinerja atraksi wisata didominasi skor 4, yakni 63%, meliputi wisata budaya, industri kreatif, kehidupan sosial, *event* berkala, dan *Unique Selling Point*. Adapun nilai terendah adalah paket wisata dengan skor 2, seperti disajikan pada Gambar 4. Desa wisata Karang mempunyai potensi yang beragam, namun belum

didesain menjadi paket wisata yang mampu menarik minat kunjungan wisatawan. Potensi wisata yang ditawarkan di desa wisata Karang, meliputi; wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, kehidupan sosial, tradisi masyarakat yang masih dilestarikan, *event* berkala, hasil industri kreatif, dan daya tarik khusus berupa kebon lesung yang menjadi ikon desa wisata (Priasukmana, 2013).



Gambar 4. Persentase Kinerja Atraksi Wisata Desa Wisata Karang
Sumber: Analisis Data Primer (2022)

4. Aksesibilitas

Kinerja aksesibilitas diukur menggunakan empat indikator, meliputi; penunjuk arah, akses jalan, peta kawasan, penerangan jalan, dan layanan disabilitas. Indikator tertinggi yakni penerangan jalan dengan skor 4 (20%), sedangkan skor terendah yakni peta wisata dan layanan disabilitas dengan skor 1(20%), seperti disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Persentase Kinerja Aksesibilitas Desa Wisata Karang
Sumber: Analisis Data Primer (2022)

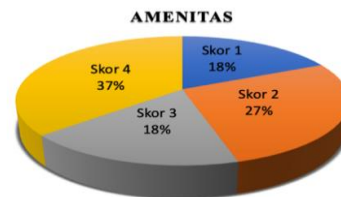
Aksesibilitas menuju desa wisata Karang sudah sangat memadai, diantaranya tersedia penerangan jalan di semua area dan jalan sudah beraspal dalam keadaan baik, tidak berlobang, serta mudah dilalui moda transportasi kendaraan roda dua dan empat (Hadiwijoyo, 2012). Namun demikian, masih

ada yang belum terpenuhi, yakni lahan parkir yang representatif, peta Kawasan, dan layanan disabilitas.

5. Amenitas

Kinerja amenities diukur menggunakan 12 indikator, meliputi; fasilitas makan-minum, kantor sekretariat, gerai souvenir, jaringan internet, fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), jaringan listrik, air bersih, area parkir, lahan terbuka, sarana peribadahan, toilet, dan *homestay* (Hadiwijoyo, 2012). Nilai tertinggi, yakni indikator jaringan internet, lahan terbuka, sarana peribadahan, dan *homestay*, sedangkan nilai terendah fasilitas makan dan minum dan gerai souvenir.

Persentase kinerja amenities berdasarkan skor disajikan pada Gambar 6. Amenitas di desa wisata Karang yang sudah memadai meliputi jaringan internet, lahan terbuka publik, sarana peribadahan, *homestay*, sarana air bersih, dan area parkir. Sedangkan, amenities yang masih perlu ditingkatkan yakni; kantor sekretariat yang belum mempunyai gedung tersendiri, fasilitas kesehatan dan alat pemadam kebakaran yang belum tersedia secara lengkap, belum tersedia kloset duduk, penyediaan makanan dan minuman yang belum standar, dan belum terdapat kios atau gerai cinderamata.

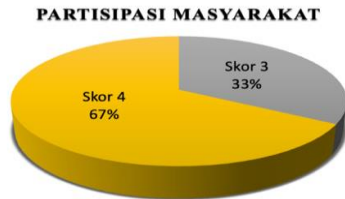


Gambar 6. Persentase Kinerja Amenitas Desa Wisata Karang
Sumber: Analisis Data Primer (2022)

6. Partisipasi Masyarakat

Kinerja partisipasi masyarakat diukur menggunakan tiga indikator, meliputi partisipasi pengelolaan, partisipasi pemodal, dan pemberdayaan masyarakat. Persentase ketiga indikator terbagi menjadi

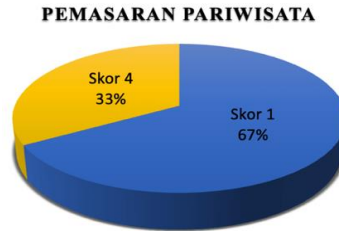
dua, seperti disajikan pada Gambar 7. Partisipasi masyarakat yang dinilai tinggi yakni partisipasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 67%. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dimulai dari proses perencanaan, operasional, pengambilan keputusan, sampai monitoring dan evaluasi (Rubiantoro, 2013). Keterlibatan tersebut memberikan kesempatan peluang kerja yang luas bagi masyarakat desa wisata Karang. Selain keterlibatan tersebut, masyarakat lokal juga mendukung pemodal, baik dalam bentuk uang *cash* maupun fasilitas lain, namun masih relatif terbatas.



Gambar 7. Persentase Kinerja Partisipasi Masyarakat Desa Wisata Karang
Sumber: Analisis Data Primer (2022)

7. Pemasaran Pariwisata

Kinerja pemasaran pariwisata diukur melalui tiga indikator, yakni memiliki MoU, *digital marketing*, dan *direct promotion*. Metode pemasaran yang digunakan desa wisata Karang saat ini sudah menerapkan pemasaran berbasis digital (Juliana dkk., 2020) yang memadai terlihat dari nilai indikator yang maksimal yakni mendapat skor 4, namun kemitraan dengan *stakeholder* terkait masih relatif lemah terlihat dari MoU yang sangat minim serta *direct promotion* juga masih belum optimal, terlihat dari skor indikator yang kecil yakni 1, seperti terlihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Persentase Kinerja Pemasaran Pariwisata Desa Wisata Karang
Sumber: Analisis Data Primer (2022)

8. Konservasi

Kinerja konservasi diukur menggunakan enam indikator meliputi; kebijakan pelestarian, kelembagaan pelestarian, fasilitas pelestarian, pelatihan budaya secara rutin, pengelolaan limbah, dan mitigasi bencana. Semua indikator mendapat nilai maksimal, kecuali pelatihan budaya rutin yang mendapat skor 3 (17%), seperti disajikan pada Gambar 9. Desa wisata Karang sudah mengimplementasikan konservasi lingkungan dan budaya. Konservasi lingkungan (Rahayu dkk., 2016) terlihat dari upaya pengolahan limbah, pengelolaan sungai dengan baik, dan penerapan mitigasi bencana untuk jaminan keselamatan bagi wisatawan yang beraktivitas wisata di sungai. Konservasi budaya diimplementasikan dengan pemeliharaan budaya, meliputi seni kerawitan, atraksi menumbuk padi menggunakan *lesung*, dan edukasi pertanian. Konservasi budaya melalui pentas budaya sudah ada, namun belum diselenggarakan secara rutin hanya berdasarkan permintaan aau pemesanan.



Gambar 9. Persentase Kinerja Konservasi Desa Wisata Karang
Sumber: Analisis Data Primer (2022)

KESIMPULAN

Kinerja pengelolaan desa wisata Karang terdiri dari kelembagaan, kemitraan, lingkungan, partisipasi masyarakat, atraksi wisata, aksesibilitas, amenities, dan pemasaran pariwisata yang diukur menggunakan masing-masing indikator. Dari hasil skoring tercatat, kinerja pengelolaan yang dinilai baik yakni kelembagaan, atraksi wisata, dan amenities, sedangkan yang dinilai cukup, yakni kemitraan, aksesibilitas, partisipasi masyarakat, pemasaran pariwisata, dan konservasi. Desa wisata Karang sebagai desa wisata rintisan belum mempunyai kinerja yang dinilai baik sekali. Dari hasil pengukuran terdapat beberapa indikator yang sudah memadai untuk dipertahankan, meliputi Struktur organisasi, dokumen AD/ART, transparansi laporan keuangan, dokumen masterplan, ketersediaan pemandu lokal, kemitraan dengan pihak eksternal, kontribusi kemitraan, keberlanjutan kemitraan, atraksi wisata alam, budaya, dan buatan, industri kreatif, kehidupan sosial, penyelenggaraan event secara berkala, unique selling point, kemudahan akses jalan, penerangan jalan, kelancaran akses internet, ketersediaan air bersih, lahan parkir yang memadai, lahan terbuka, sarana peribadahan, ketersediaan homestay, partisipasi masyarakat yang kuat dalam pengelolaan, pemodalan, pemasaran berbasis digital, dan implementasi konservasi lingkungan dan budaya. Sedangkan indikator yang belum memadai dan harus ditingkatkan meliputi; Pengelolaan data base wisatawan, kemitraan internal, penyusunan paket wisata, ketersediaan penunjuk arah dan peta Kawasan, layanan disabilitas, fasilitas makan dan minum, ketersediaan kantor sekretariat dan gerai souvenir, fasilitas P3K, toilet yang memadai, ketersediaan MoU, dan promosi secara langsung terhadap target market.

SARAN

Penelitian melibatkan delapan kinerja pengelolaan desa wisata yang masih bersifat luas atau umum, yakni terdiri dari kelembagaan, aksesibilitas, partisipasi masyarakat, amenities, pemasaran pariwisata, atraksi wisata, dan konservasi. Adapun pengelolaan desa wisata sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek, diantaranya sumber daya manusia, homestay, dan kelompok sadar wisata. Penelitian selanjutnya bisa memfokuskan pembahasan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan homestay, serta penilaian kinerja kelompok sadar wisata sebagai pengolah sumber daya yang dimiliki sebuah desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyah, N., Fediyanto, N., Rahma, Z., Nurrachma, F. S., & Safitri, S. G. (2022). Pemberdayaan Rintisan Desa Wisata Berbasis Pendampingan: Desa Ngeembe, Beji, Pasuruan. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 604-610.
- Adikampana, I. M. (2017). *Masyarakat*. Denpasar: Cakra Press.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Asker, S., Boronyak, L., Carrard, N., & Paddon, M. (2010). *Effective community based tourism: a best practice manual*. Sustainable Tourism Cooperative Research Centre, Gold Coast. Australia.
- Azni, U. S., & Alfitri. (2020). The implementation of community based tourism model in the development of the Semambu Island tourism village, Ogan Ilir Regency, South Sumatra. *Simulacra*, 3(1), 109–120.
- Baskoro & Cecep, R. (2008). Membangun Kota Pariwisata Berbasis Komunitas: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 3(1), 37-50.

- Basyuni, M., Bimantara, Y., Siagian, M., Wati, R., Slamet, B., & Sulistiyono, N. (2018). Developing community-based mangrove management through eco-tourism in North Sumatra, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126, 012109.
- Dinas Pariwisata D.I.Y. 2020. *Kajian Sustainable Tourism Development dalam Pengembangan kepariwisataan di DIY*. Laporan akhir kajian bidang pariwisata Dinas Pariwisata DIY, 160 hal.
- Darwanto. (2018). Pengembangan Rintisan Desa Wisata Berbasis Potensi Desa, *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2).
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community-based tourism: A success?. *ICRT Occasional Paper* 11.
- Hadiwijoyo, S.S. (2012). *Perencanaan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat (sebuah pendekatan konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harianja, R., Putra, R.R., Mustofa, A.N.A., Pratami, M., Syahputra, A., & Surya, T.E.W. (2022). Perilaku Berwisata Wisatawan Nusantara Pasca Pandemi Covid-19, *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*, 7(1), 34-44.
- Juliana, J., Lemy, D., Hubner, I., Pramono, R., Maleachi, S., & Sitorus, N. (2022). Acceleration of community-based tourism village development in West Java Province. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 7(1).
- Hadi M.J., Lume., & Widyaningrum, M. (2022). Pemetaan Potensi Wisata, Peluang Dan Tantangan Pengembangan Desa Wisata Pengadangan Barat, Kabupaten Lombok Timur. *Journal of Tourism and Economic*, 5 (1), 32-45.
- Hutagalung, H., Purwana, D., Suhud, U., Mukminin, A., Hamidah, H., & Rahayu, N. (2022). Community Self-Reliance of Rural Tourism in Indonesia: An Interpretative Phenomenological Analysis. *The Qualitative Report*, 27(7), 1151-1168. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5215> (Q1).
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2012). *Pedoman pokdarwis*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Kibicho, W. (2008). Community - based tourism: A factor - cluster segmentation approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(2), 211-231.
- Kiswanto, A & Susanto, D.R. (2021). Strategi Pengembangan Desa Wonokriti Sebagai Desa Wisata Edelweis Di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Journal of Tourism and Economic*, 4 (2), 119-134.
- Kusuma, P.A & Salindri, Y.A. (2022). Pengembangan Potensi Wisata Di Desa Wisata Sidorejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Tourism and Economic*, 5 (1), 46-62.
- Maemunah I. (2021). Implementation of Cleanliness, Health, and Environmental Sustainability Guidelines in Restaurants around the Southern Java Crossing Route in Ciamis Regency. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4, 2635-2642.
- Mertha, I.W., Wiarti, L.Y., & Suasapha, A.H.. (2018). Stakeholders: Peran dan Kendala Pelibatangannya Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Bali, *Jurnal Kepariwisata*, 17(2), 15-23.
- Mill, R.C. (2000). *Tourism The International Bussines*. Jakarta : PT Grafindo Persada
- Nugroho, D.S. (2018). Community based tourism tantangan Dusun Nglepen dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Pariwisata*, 5(1), 42-55.
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014) Peran pemerintah daerah dalam

- pemberdayaan masyarakat petani jagung di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintah*, 4(1), 66-78.
- Peraturan Gubernur No 40, Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata. Retrieved from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/154685/pergub-no-40-tahun-2020>
- Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 16 (2), 164-171.
- Priasukmana, S., & Mulyadin, R.M. (2013). Pembangunan desa wisata: pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. *Jurnal Info Sosial Ekonomi*, 2(1), 37-44.
- Purnamasari, A.M. (2011). Pengembangan masyarakat untuk pariwisata di kampung wisata Toddabojo, Sulawesi Selatan. *Jurnal of Regional and City Planning*, 22(1), 49-64. (Q2)
- Putri, A.R., Purnamasari, N.L., & Elmasari, Y.L. (2020). Pendampingan Rintisan Desa Wisata Berbasis Teknologi. *Jurnal Pasopati : Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 2 (4).
- Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K.N. (2016). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(1).
- Rubiantoro, E. A., & Haryanto, R. (2013). Bentuk keterlibatan masyarakat dalam upaya penghijauan pada kawasan hunian padat di Kelurahan Serengan, Kota Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 9(4), 416-428
- Salazar, N. (2012). Community - based cultural tourism: Issues, threats and opportunities. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(1), 9-22.
- Sinery & Manusawai. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(3), 394-401.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: Rest Project.
- Sudarmadji, S.S, M., & Widyastuti, R.H. (2011). Konservasi Mata Air Berbasis Masyarakat di Unit Fisiografi Pegunungan Baturagung, Ledok Wonosari dan Perbukitan Karst Gunung Sewu, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Tekno Sains*, 1(1).
- Sudiasmo, F., & Yefi, D.N.H. (2021). Model Konservasi Berbasis Masyarakat Dalam Desa Wisata Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 11(1), 97-108.
- Sunarjaya, I.G., Antara, M., & Prasiasa, D.P.O. (2018). Kendala Pengembangan Desa Wisata Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung. *JUMPA* 4 (2), 215 – 227
- Surjanti, J., Soejoto, A., Seno, D.N, & Waspodo. (2020). Mangrove forest ecotourism: Participatory ecological learning and sustainability of students' behavior through self-efficacy and self-concept. *Social Sciences & Humanities Open*, 2: 100009.
- Unair News. (2021). Kategori Desa Wisata di Indonesia Berdasarkan Pengembangannya. Retrieved from <https://news.unair.ac.id/2021/08/03/kategori-desa-wisata-di-indonesia-berdasarkan-pengembangannya/?lang=id> 3 agustus 2021,
- Weaver, D. (2010). Community-based tourism as strategic dead-end. *Tourism Recreation Research*, 35(2), 206–208

- Yamashita, S. (2011). Community-Based Associations for Sustainable Tourism Development: Fostering Sustainable Development in Developing Countries. *Digitala V etenskapliga Arkivet*. Retrieved from <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A465809&dswid=578>
- Yoga, M.S., Atabuy, F.E.Y., & Widhi, A.E.P. (2017). Evaluasi Community-Based Tourism Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal Pantai Pandawa, Bali. *Prosiding Seminar dan Call For Paper*. 20-21 Oktober 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo – Indonesia.
- Zakaria, F., & Suprihardjo, D. (2014). Konsep pengembangan kawasan desa wisata di Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Teknik Pomits*, 3(2), 245-249.